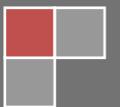




PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

RENCANA KINERJA TAHUNAN
SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2023



SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BULELENG TAHUN 2023





Rencana Kinerja Tahunan(RKT) Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2023

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/*Ida Hyang Widhi Wasa* atas *Asung Kerta Wara Nugrahanya*, sehingga Pemerintah Kabupaten Buleleng dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2023, sebagaimana diamanatkan dalam Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Dokumen ini berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239 / IX / 6 / 8 / 2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini, secara substansi merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menginformasikan tentang pernyataan kinerja untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2023 dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan di Pemerintah Kabupaten Buleleng berdasarkan pada sumber daya yang



Rencana Kinerja Tahunan(RKT) Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2023

dimiliki oleh instansi. Dengan dokumen ini diharapkan agar para Kepala Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Buleleng mampu mewujudkan serta mempetanggungjawabkan kinerjanya baik kepada atasan maupun kepada masyarakat. Dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam upaya membangun Manajemen Pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil (outcome), yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

Semoga Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Buleleng ini bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2023 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk menyempurnakan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Singaraja, 03 Januari 2023
Sekretaris DPRD Kabupaten Buleleng

TTD

I Gede Sandhiyasa, S.Sos., M.Si

NIP: 196507041986021009



Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2023

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
BABI Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng.....	2
1.3. Tujuan Rencana Kinerja Tahunan.....	4
BABII Rencana Kinerja Tahunan	5
2.1. Sasaran/Capaian Program.....	5
2.2. Indikator dan Target Kinerja	6
BABIII Penutup	8

Lampiran Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2023



Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2023

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat menjadi salah satu cita-cita yang ingin dicapai oleh instansi pemerintah maupun bagi masyarakat. Intruksi

Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi merupakan salah satu wujud nyata niat pemerintah untuk memerangi korupsi baik secara represif maupun preventif. Penanganan masalah pemberantasan korupsi tidak dapat lagi dilakukan secara sporadic / parsial, namun membutuhkan suatu pola komprehensif dan sistematis. Penanganan tindak korupsi secara sistematis ini antara lain dilakukan dari segi preventif melalui perbaikan sistem manajemen pemerintahan yang mengedepankan adanya transparansi dan akuntabilitas. Untuk dapat mewujudkan adanya suatu pemerintahan yang baik, perlu mengadakan perencanaan, perjanjian kinerja dan pengukuran kinerja sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan. Selain perencanaan yang matang Pemerintah juga perlu mengadakan perjanjian dari kinerja tersebut sebagai suatu pedoman yang akan dilaksanakan dan yang akan dicapai oleh Pemerintah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran. Berkenaan dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Buleleng menetapkan Dokumen Rencana Kinerja Tahunan sebagai komitmen pemerintah dalam menyelenggarakan manajemen pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mencapai visi dan menjalankan misi Kabupaten Buleleng sebagaimana tercantum



Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2023

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Buleleng dalam upaya terwujudnya masyarakat Buleleng yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing berlandaskan Tri Hita Karana melalui pelaksanaan pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, berdaya guna, berhasil guna serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

1.2 Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Buleleng

Pemerintah Kabupaten Buleleng bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng. Penetapan Peraturan Daerah ini sebagai upaya memenuhi tuntutan masyarakat dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Buleleng, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan visi Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk diharapkan mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat di Kabupaten Buleleng antara lain adalah sebagai berikut :

1. Bupati dan Wakil Bupati
2. Sekretariat DPRD yang dipimpin oleh Sekretaris DPRD, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh :
 - a. Bagian Umum terdiri dari :
 1. Sub. Bagian Tata Usaha
 2. Sub. Bagian Rumah Tangga



Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2023

3. Sub. Bagian Kepegawaian dan Pengembangan SDM
 - b. Bagian Keuangan terdiri dari :
 1. Sub. Bagian Akuntansi
 2. Sub. Bagian Verifikasi
 3. Sub. Bagian Penyusunan Program dan Anggaran
 - c. Bagian Hukum dan Persidangan terdiri dari:
 1. Sub. Bagian Perundang-undangan
 2. Sub. Bagian Risalah
 2. Sub. Bagian Persidangan
 - d. Bagian Humas, Protokol dan Pengawasan terdiri :
 1. Sub. Bagian Pengawasan
 2. Sub. Bagian Humas dan Protokol
 3. Sub. Bagian Fasilitas Kerjasama dan Aspirasi



Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2023

1.3 Tujuan Rencana Kinerja Tahunan(RKT)

Rencana Kinerja Tahunan yang merupakan dokumen Perencanaan untuk periode 1 tahun yang memuat sasaran/capaian program, indikator kinerja, program dan kegiatan dimana merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026. Adapun tujuan umum diterapkannya Rencana Kinerja Tahunan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rencana Kinerja Tahunan adalah:

- a) Intensifikasi dalam upaya Pencegahan Korupsi
- b) Peningkatan kualitas pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik
- c) Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparatif dan akuntabel

Sedangkan tujuan khususnya adalah :

- a) Meningkatkan Akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur pemerintah
- b) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah
- c) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah
- d) Tolok ukur pencapaian kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
- e) Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.



Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2023

BAB II

RENCANA KINERJA TAHUNAN

2.1 Sasaran / Capaian Program

Dalam rangka merealisasikan visi Kabupaten Buleleng yaitu *“Terwujudnya masyarakat Buleleng yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing berlandaskan Tri Hita Karana”* dan untuk menjalankan misi yang akan dilaksanakan, Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng telah menetapkan sasaran/capaian program yang akan dicapai. Sasaran/Capaian Program merupakan suatu kondisi tertentu yang ingin dicapai dalam setiap tahun anggaran melalui pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan RPJMD yang telah ditetapkan. Rencana Kinerja Tahunan merupakan dokumen Perencanaan untuk periode 1 tahun yang memuat sasaran/capaian program, indikator kinerja, program dan kegiatan dimana merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026 untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Kabupaten Buleleng.

Sasaran / Capaian Program menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui tindakan/kegiatan yang bersifat spesifik, rinci, dapat diukur dan dapat dicapai (realistis), sinerjik dan berkelanjutan (sesuai dengan keadaan).

Sasaran dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu : (1) sasaran tahunan; dan (2) sasaran lima tahun. Sasaran Tahunan adalah sasaran yang ingin dicapai pada satu tahun tertentu (melalui pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kinerja) , sedangkan sasaran



Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2023

lima tahunan (dinyatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD). Sasaran harus mendukung tercapainya tujuan dan misi dalam upaya merealisasikan visi. Sasaran yang ingin dicapai pada Tahun 2023 (Tahun ke-5).

2.2 Indikator dan Target Kinerja

Didalam penerapan sistem AKIP, setiap instansi pemerintah yang melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya diharapkan menetapkan indikator kinerja. Indikator kinerja merupakan bagian penting bagi setiap instansi pemerintah karena merupakan komponen utama dalam Sistem AKIP yang akan digunakan dalam menilai keberhasilan maupun kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka mencapai visi dan misinya.

Indikator Kinerja adalah suatu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja dapat memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang akan diukur untuk menentukan apakah tujuan dan sasaran dari suatu program dan kegiatan sudah tercapai. Indikator Kinerja juga menetapkan bagaimana kinerja akan diukur dengan suatu skala atau dimensi tanpa menyinggung tingkat pencapaian khusus. Penetapan Indikator Kinerja suatu unit kerja atau instansi pemerintah haruslah selaras dengan indikator pemerintah atasannya, sehingga perencanaan pemerintah atasan dapat didukung oleh instansi pemerintah atau unit kerja di bawahnya.



Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2023

Indikator Kinerja dalam Dokumen Rencana Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng menggunakan indikator kinerja pada tingkat hasil (outcomes) dan menggambarkan ukuran keberhasilan Sekretariat DPRD secara keseluruhan, Keberhasilan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Buleleng merupakan keberhasilan dari seluruh unit kerja pendukungnya. Dengan kata lain indikator kinerja pada tingkat ini bukan sekedar gabungan dari berbagai indikator kinerja pada unit kerja pendukungnya, tetapi merupakan rumusan pokok atau inti dari berbagai indikator unit kerja pendukungnya.

Setelah menetapkan indikator kinerja, setiap instansi pemerintah diharuskan pula untuk menetapkan target kinerja yang hendak dicapai sesuai dengan sumber daya yang dikelola dan anggaran yang tersedia. Target Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dari setiap indikator kinerja yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan dalam satu tahun tertentu.

Dengan demikian, setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diwajibkan setiap pejabat menetapkan Target Kinerja Tahun 2023 sebagai Rencana Kinerja Tahunan yang telah ditetapkan. (Lampiran Rencana Kinerja Tahunan)



Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2023

BAB III PENUTUP

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Buleleng ini merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh para pejabat di setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng. Dengan demikian Rencana Kinerja Tahunan ini menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat tersebut sebagai penerima amanah dan pada akhir tahun nanti akan dijadikan sebagai dasar evaluasi kinerja dan penilaian terhadap pejabat tersebut.

Dengan Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng ini diharapkan dapat mendorong keberhasilan peningkatan kinerja Sekretariat DPRD diharapkan dapat memacu bawahannya untuk lebih meningkatkan kinerjanya dan juga harus mampu menunjukkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada atasannya dan kepada masyarakat. Selain sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

Dengan demikian Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini harus dipandang sebagai salah satu langkah sistematis yang diperlukan dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi.



Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2023

Akhirnya kami mengucapkan terimakasih kepada Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Buleleng atas partisipasinya dalam penyusunan dokumen ini, walaupun dalam penyusunannya masih jauh dari sempurna. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran...

LAMPIRAN
RENCANA KINERJA TAHUNAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BULELENG TAHUN 2023

Lampiran

RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2023
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BULELENG

SASARAN STRATEGIS		Target/ Satuan	PROGRAM	KEGIATAN			SUB KEGIATAN				Ket.				
Uraian	Indikator Kinerja (Outcome)			Uraian	Indikator Kinerja Kegiatan	Anggaran (Rp)	Uraian	Indikator Kinerja Keluaran	Target/Satuan	Anggaran (Rp)					
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11					
1	Meningkatnya Kualitas Sistem pelaporan capaian kinerja dan Penyusunan Program Anggaran Sekretariat DPRD	Persentase Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan dan Penyusunan Program Anggaran Sekretariat DPRD yang diselesaikan tepat waktu	100%	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD	Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	364,100,000.00	1.1.1	Tersedianya data penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	226,600,000	APB D
										1.1.2	Tersedianya Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	jumlah dokumen RKA_SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	12 Dokumen	117,500,000	APB D

							1.1.3	Tersedianya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	20,000,000	APB D
						1.2	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi keuangan	Prosentase pelayanan administrsai keuangan yang sesuai standar	7,268,149,000.00			
							1.2.1	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53 Orang/Bulan	6,895,322,000	APB D
							1.2.2	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10 Dokumen	99,800,000	APB D
							1.2.3	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24 Dokumen	215,750,000	APB D
							1.2.4	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	21,962,000	APB D

								1.2.5	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	24,200,000	APB D
								1.2.6	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	11,115,000	APB D
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Umum, Sarana Prasarana Dalam Rangka Menunjang Kelancaran Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Sekretariat Dalam Menunjang Tugas dan Fungsi Dewan	100%				42,946,000.00	1.3	Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi Umum	Persentase Pelayanan Administrasi Umum yang sesuai standar dalam rangka menunjang kelancaran tugas dan fungsi dprd			
								1.3.1	Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	42,946,000	APB D
3	Meningkatnya disiplin Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur Yang Disiplin	100%				817,000,000.00	1.4	Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian yang	Prosentase pelayanan administrasi kepegawaian yang sesuai ketentuan			
								1.4.1	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	53 Buah	70,000,000	APB D

		Aparatur a Baik						Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10 Dokumen	38,500,000		
								Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	38,500,000		
4	Meningkatn ya Kualitas Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng	Persentase Peningkata n Kualitas Sumber Daya Aparatur	100%					1.4.2 Terlaksananya pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	10 Orang	670,000,000	APB D	
	Meningkatn ya Kualitas Pelayanan Adminstras i Umum, Sarana Prasarana Dalam Rangka Menunjang Kelancaran Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Peningkata n Kualitas Pelayanan Sekretariat Dalam Menunjang Tugas dan Fungsi Dewan	100%			1.5	Meningkatn ya Pelayanan Adminstras i Umum yang Mendukung Kelancaran tugas dan Fungsi Perangkat Dewan yang sesuai standar	Persentase Pelayanan Administrasi Umum yang sesuai standar dalam rangka menunjang kelancaran tugas dan fungsi DPRD	3,647,284,000.00				
								1.5.1 Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	52,900,000	APB D	
								1.5.2 Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	990,000,000	APB D	
								1.5.3 Tersedianya bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60 Paket	761,500,000	APB D	

							1.5.4	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan	11 Paket	281,500,000	APB D
							1.5.5	tersedianya bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	198,000,000	APB D
							1.5.6	Tersedianya makanan dan minuman yang layak dikonsumsi	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	60 Laporan	1,198,384,000	APB D
							1.5.7	terlaksananya rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	165,000,000	APB D
						1.6	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum yang Mendukung Kelancaran tugas dan Fungsi DPRD yang sesuai standar	Persentase Pelayanan Administrasi Umum yang sesuai standar dalam rangka menunjang kelancaran tugas dan fungsi DPRD	856,816,000.00			
							1.6.1	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	48,400,000	APB D
							1.6.2	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Paket	84,216,000	APB D
								Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	700,000,000	APB D

					1.8	Meningkatnya pelayanan Administrasi Umum yang Mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat dewan yang tercapai	Prosentase pelayanan Administrasi Umum yang sesuai standar dalam rangka menunjang kelancaran tugas dan fungsi DPRD	1,726,494,000.00	1.8.1	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	65 Unit	962,434,000	APB D
									1.8.2	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	709,060,000	APB D
									1.8.3	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	213 Unit	55,000,000	APB D
	Meningkatnya Kualitas Sistem pelaporan capaian kinerja dan Penyusunan Program Anggaran Sekretariat DPRD	Persentase Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan dan Penyusunan Program Anggaran Sekretariat DPRD yang diselesaikan tepat	100%		1.9	Meningkatnya layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD yang tercapai	Prosentase layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD yang sesuai standar	41,344,071,000.00	1.9.1	Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	45/12 Orang/Bulan	41,071,051,000	APB D
									1.9.2	Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	45 Paket	196,020,000	APB D

		waktu						1.9.3	Terlaksananya <i>Medical Check Up</i> DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	45 Orang	77,000,000	APB D	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Umum, Sarana Prasarana Dalam Rangka Menunjang Kelancaran Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Sekretariat Dalam Menunjang Tugas dan Fungsi Dewan	100%		1.10	Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi DPRD yang tercapai	Prosentase pelayanan Administrasi Umum yang sesuai standar dalam rangka menunjang kelancaran tugas dan fungsi DPRD	1,024,000,000.00	1.10.1	Terfasilitasinya rapat - rapat DPRD yang sesuai standar	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	50 Laporan	396,000,000	APB D
1.10.2									Tersedianya kebutuhan rumah tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	48 Paket	628,000,000	APB D	
5	Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Fasilitas Pembahasan Ranperda Yang ditindak Lanjuti Menjadi Perda	Persentase Fasilitas Pelayanan Pembahasan Ranperda Yang Memiliki Kualitas	100%	2	Program dukungan tugas dan fungsi DPRD	2.1	Meningkatnya pelayanan fasilitas rapat - rapat Pembentukan Perda Dan Peraturan DPRD yang sesuai standar	3,895,500,000.00	2.1.1	Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah dokumen hasil penyusunan dan pembahasan propem perda	1 Dokumen	352,000,000	APB D
2.1.2									Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah dokumen hasil pembahasan RANPERDA	12 Dokumen	3,256,000,000	APB D	
2.1.3									Terlaksananya Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah dokumen kajian perundang-undangan	12 Dokumen	137,500,000	APB D	

								2.1.4	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah dokumen hasil penyusunan penjelasan atau keterangan dan / atau naskah akademik yang difasilitasi	1 Dokumen	150,000,000	APB D
								2.2	Meningkatnya Kualitas Fasilitasi rapat-rapat pembahasan Kebijakan Anggaran DPRD yang sesuai standar	Persentase fasilitasi rapat - rapat Pembahasan Kebijakan Anggaran yang sesuai standar	372,900,000.00		
								2.2.1	Terlaksananya Pembahasan APBD	Jumlah dokumen hasil pembahasan APBD	3 Dokumen	181,500,000	APB D
								2.2.2	Terlaksananya Pembahasan APBD	Jumlah dokumen hasil pembahasan APBD perubahan	3 Dokumen	110,000,000	APB D
								2.2.3	Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah dokumen hasil pembahasan pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	81,400,000	APB D
6	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penerimaan Aspirasi Yang Disampaikan Masyarakat Kepada Dewan Melalui Sekretariat DPRD	Persentase Kualitas Pelayanan Penerimaan Aspirasi Yang Disampaikan Masyarakat Kepada Dewan Melalui Sekretariat DPRD Sesuai Standar Pelayanan Yang	100%					2.3	Meningkatnya kualitas fasilitasi pengawasan DPRD	Persentase fasilitasi kegiatan pengawasan penyelenggaraan bidang pemerintahan yang sesuai standar	5,960,000,000.00		
								2.3.1	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah laporan hasil pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum	10 Laporan	1,080,000,000	APB D
								2.3.2	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah laporan hasil pengawasan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat	10 Laporan	1,900,000,000	APB D

				2.4.6	Tersusunnya Rencana Kerja DPRD	Jumlah dokumen rencana kerja DPRD	1 Dokumen	19,800,000	APB D				
			11,635,670,000.00	2.5	Meningkatnya kualitas fasilitasi kehumasan dan penghimpunan aspirasi masyarakat yang sesuai standar	Persentase fasilitasi penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat yang sesuai standar							
		2.5.1		Terselenggaranya Kunjungan Kerja DPRD						Jumlah laporan hasil kunjungan kerja DPRD	2 Laporan	496,070,000	APB D
		2.5.2		Tersusunnya Pokok-Pokok Pikiran DPRD						Jumlah dokumen pokok-pokok pikiran DPRD yang di susun	1 Dokumen	39,600,000	APB D
				2.5.3	Terlaksananya Reses	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan reses	135 Dokumen	11,100,000,000	APB D				
				2.6	Pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD	prosentase Pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD		-					
			6,692,350,000.00	2.6.1	Terlaksananya Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah laporan hasil pengawasan kode etik DPRD	12 Laporan	100,000,000	APB D				
				2.6.1	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	10 Dokumen	5,500,000,000	APB D				
				2.6.2	Tersusunnya Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD	Jumlah laporan fraksi, alat kelengkapan dan kinerja DPRD yang di susun	12 Dokumen	42,350,000	APB D				

										2.6.3	Terlaksananya Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah dokumen hasil fasilitasi tugas pimpinan DPRD	10 Dokumen	1,150,000,000	APB D
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	---	------------	---------------	-------

91,540,130,000.00

91,640,130,000.00

Singaraja, 03 Januari 2022

Sekretaris DPRD Kabupaten Buleleng

TTD

I Gede Sandhiyasa, S.Sos., M.Si

NIP: 196507041986021009